

2

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DALAM UPAYA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KEDIRI

Purbayu Budi Santosa dan Retno Puji Rahayu

Abstract

PAD as one of local revenue tells about autonomous of local step. More and more PAD become higher so that the local is able to apply fiscal decentralization and the dependent with the central government is crease. PAD means as the revenue from the result is their own territory which taken base on the law. The purpose of this research to analyse the factor that influence in PAD. That factor are expenditure of development, in habitan, PDRB. The data that use in the research is time series of 1989 to 2002. Estimate model that use multiple regresion which transformed in the logarithms model.

Key-words : fiscal decentralization, PAD, in habitan, PDRB, expenditure of development

Abstraksi

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD. Faktor-faktor tersebut meliputi : pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB. Data yang diamati dalam penelitian ini adalah data runtut waktu periode 1989-2002. Model estimasi yang digunakan adalah regresi berganda yang ditransformasikan ke bentuk logaritma.

Kata Kunci: desentralisasi fiskal, PAD, penduduk, PDRB, pengeluaran pembangunan

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi yang bervariasi, mendorong setiap daerah Kabupaten atau Kota untuk mengembangkan potensi ekonominya. Oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung disetiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Proporsi derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Kediri seperti terlihat dalam tabel di bawah ini diperoleh hasil rata-rata sebesar 16,15 persen. Dengan hasil tersebut berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Badan Litbang Depdagri dan Fispol UGM (1991) maka derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kediri berada diantara 10,1 persen sampai dengan 20 persen sehingga termasuk dalam kategori kurang.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kediri menurut Badan Litbang Depdagri dan Fispol UGM, 1991 termasuk kategori kurang. Untuk itu, Kabupaten Kediri harus dapat meningkatkan derajat desentralisasi fiskalnya melalui peningkatan PAD seoptimal mungkin.

Tabel
Derajat Desentralisasi Fiskal dan Peranan Subsidi / Bantuan Pemerintah
Kabupaten Kediri 1989 - 2002

Tahun	PAD	B	TPD	DDF	TPB
1989	1.966.000	8.912.000	11.026.000	17,83	80,83
1990	1.896.500	12.033.800	16.113.600	11,78	74,68
1991	3.016.216	13.670.188	19.109.713	15,78	71,54
1992	3.384.243	16.714.067	22.685.536	14,92	73,68
1993	3.519.981	20.490.009	27.893.341	12,92	73,46
1994	4.620.927	19.989.982	30.037.393	15,38	66,55
1995	6.185.351	18.245.264	30.568.238	20,23	59,69
1996	7.514.658	21.563.776	40.578.047	18,52	53,14
1997	9.323.185	26.564.144	49.685.639	18,76	53,46
1998	9.862.846	77.770.448	102.796.477	9,59	75,65
1999	9.633.889	-	148.700.687	6,48	-
2000	11.732.078	92.673.075	145.796.620	8,05	63,56
2001	15.543.096	31.335.241	48.304.571	32,18	64,87
2002	22.592.241	39.651.776	95.415.570	23,68	41,56
Rata-rata				16,15	60,91

Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka

Keterangan : PAD = Pendapatan Asli Daerah

B = Sumbangan/Bantuan Pemerintah Pusat

TPD = Total Penerimaan Daerah

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

TPB = Tingkat Peranan Bantuan

Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang sebelumnya diurus pemerintahan pusat. Untuk itu, selain diperlukan kemampuan keuangan, diperlukan juga adanya sumber daya manusia berkualitas, sumber daya alam, modal, dan teknologi (Rudini, 1995:48 dalam Silalahi, *et al*, 1995).

Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Sumber daya manusia yang dibutuhkan tersebut antara lain adalah (Silalahi, *et al*, 1995:12) :

1. Mempunyai wadah, perilaku, kualitas, tujuan dan kegiatan yang dilandasi dengan keahlian dan ketrampilan tertentu.
2. Kreatif dalam arti mempunyai jiwa inovatif, serta mampu mengantisipasi tantangan maupun perkembangan, termasuk di dalamnya mempunyai etos kerja yang tinggi.
3. Mampu sebagai penggerak swadaya masyarakat yang mempunyai rasa solidaritas sosial yang tinggi, peka terhadap dinamika masyarakat, mampu kerja sama, dan mempunyai orientasi berpikir *people centered orientation*.
4. Mempunyai disiplin yang tinggi dalam arti berpikir konsisten terhadap program, sehingga mampu menjabarkan kebijaksanaan nasional menjadi program operasional pemerintah daerah sesuai dengan rambu-rambu pengertian program urusan yang ditetapkan.

Sumber Penerimaan

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yaitu (Josef Riwo Kaho, 1988:123-125):

1. Daerah dapat mengumpulkan dana pajak daerah yang telah disetujui pemerintah.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang barang maupun pemerintah.
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut oleh daerah, misalnya sekian persen dari pajak tersebut.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan atau subsidi dari pemerintah Kabupaten.

Desentralisasi Fiskal

Tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah yaitu (Bird dan Vaillancourt, 2000:4 dalam Y Sri Susilo, 2002) :

1. Desentralisasi, yang berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau pemerintah daerah.
2. Delegasi yang berhubungan dengan situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah.
3. Devolusi atau pelimpahan yang berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah.

Peranan Pemerintah

Penyelenggaraan pemerintah di daerah merupakan manifestasi dari pemerintahan seluruh wilayah negara. Untuk itu segala aspek menyangkut konfigurasi kegiatan dan karakter yang berkembang, akan mewarnai penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Peranan dan kedudukan pemerintahan daerah sangat strategis, dan sangat menentukan secara nasional, sehingga paradigma baru pemerintahan yang berbasis daerah akan berimplikasi pada bergesernya tugas dan fungsi pemerintah pusat lebih banyak ke arah penyelenggaraan fungsi pengarah dan mendelegasikan sebagian besar kegiatan di daerah dengan memberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada daerah, sehingga persepsi lama yang

sering didengar menyangkut egoisme sektoral akan terhapus. Propinsi yang berkedudukan sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi akan melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur. Propinsi sebagai daerah otonom, bukan merupakan daerah dari daerah Kabupaten maupun Kota. Daerah otonom Propinsi terhadap Kabupaten dan Kota tidak mempunyai hubungan hierarki. Maksudnya adalah bahwa daerah otonom Propinsi tidak membawahi daerah otonom Kabupaten dan Kota, tetapi dalam praktek terdapat hubungan koordinasi, kerjasama, dan atau kemitraan sebagai sesama daerah otonom. Dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi, gubernur selaku wakil pemerintah melakukan hubungan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah Kabupaten dan Kota (J. Kaloh, 2002:55).

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersenut. Dalam teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu (Guritno, 1994;169):

1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas social seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat.

Wagner menerangkan mengapa peran pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Formulasi hukum Wagner ialah sebagai berikut :

$$\frac{P_k PP_1}{PPK_1} < \frac{P_k PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_k PP_n}{PPK_n}$$

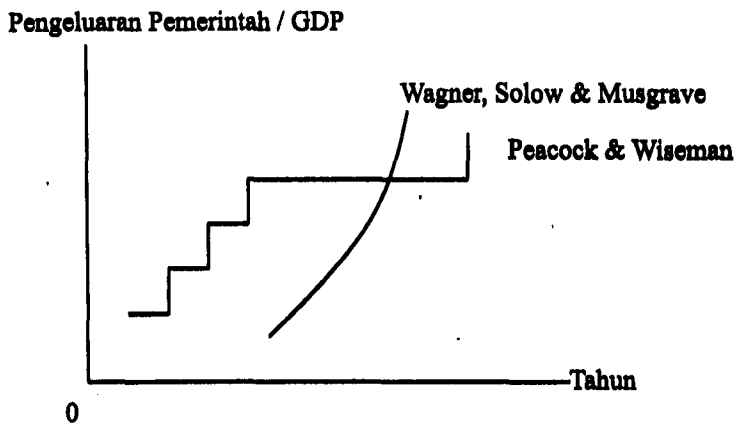
- $P_k PP$ = Pengeluaran pemerintah per kapita
- PPK = Pendapatan per kapita, yaitu GDP atau jumlah penduduk
- 1,2,...,n = Jangka waktu (tahun)

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah *senantiasa* berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Teori Peacock dan Wiseman adalah pemerintah ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Peacock dan Wiseman menjelaskan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah tidak berbentuk garis tetapi berbentuk seperti tangga seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah ini:



Gambar
Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan program yang memerlukan keterlibatan segenap unsure satu lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan segaian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi (Sadono Sukirno 1994:151). Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

Pengaruh PDRB terhadap Pemerintah

PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir (semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (satu tahun)). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara perhitungan. Tiga cara perhitungan tersebut adalah sebagai berikut (Sadono Sukirno, 1994):

1. Cara Produksi

Nilai seluruh produksi diperoleh dari menjumlahkan nilai-nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh berbagai industri yang ada dalam perekonomian. Hasil perhitungannya disebut PDRB. Unit-unit produksi tersebut sebelum tahun 1993 dikelompokkan dalam 11 lapangan usaha, sesudah tahun 1993 dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha, yaitu: pertanian; pertambangan dan galian; industri pengolahan; listrik gas dan air bersih; bangunan/konstruksi; perdagangan; rumah makan dan jasa akomodasi; angkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; sewa bangunan dan jasa perusahaan; jasa-jasa.

2. Cara pengeluaran.

Nilai seluruh produksi diperoleh dari penjumlahan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan rumah-rumah tangga dan perusahaan-perusahaan, pemerintah dan luar negeri atas produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah, seperti:

- a. Pengeluaran konsumen rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari hutang.
- b. Konsumen pemerintah.
- c. Pembentukan modal tertentu domestik bruto
- d. Perubahan stok
- e. Ekspor neto

3. Cara pendapatan

Nilai seluruh produksi dalam perekonomian diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan seluruh factor produksi yang digunakan dalam produksi, yaitu pendapatan dari sumber alam, tenaga kerja, modal yang ditawarkan dan keahlian kepemimpinan.

Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD

Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula (Sucipto Wirosardjono:1998).

Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Agus Widarjono, 1999 dalam Ari Budihardjo, 2003)

Adam Smith berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu

hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

Metode Penelitian

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu.

Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Jenis data yang tersedia harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu penelitian. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menentukan lokasi penelitian di Kabupaten Kediri. Data yang digunakan adalah data sekunder selama 14 tahun.

Definisi Operasional

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, dihitung dalam ribuan rupiah per tahun.
2. PDRB yang digunakan adalah PDRB menurut lapangan usaha atau dasar harga berlaku.
3. Jumlah penduduk yang digunakan adalah jumlah penduduk akhir tahun.
4. Pengeluaran pemerintah yang digunakan adalah realisasi pengeluaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Metode Analisis

Analisis Regresi

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya yang ada. Yang dapat dinotasikan secara fungsional.

$$Y = f (X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots (1)$$

Selanjutnya fungsi regresi tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma berganda dengan menggunakan logaritma natural (ln) sebagai berikut (Damodar Gujarati, 1991)

$$\text{Ln}Y = b_0 + b_1 \text{ln}X_1 + b_2 \text{ln}X_2 + b_3 \text{ln}X_3 + e \dots\dots\dots (2)$$

di mana :

- Y = dari Pendapatan Asli Daerah
- X₁ = dari Total Pengeluaran Pemerintah
- X₂ = dari Jumlah Penduduk
- X₃ = dari Produk Domestik Regional Bruto
- b₁ = mengukur elastisitas PAD terhadap PNGL dimana PDK dan PDRB konstan
- b₂ = mengukur elastisitas PAD terhadap PDK dimana PNGL dan PDRB konstan
- b₃ = mengukur elastisitas PAD terhadap PDRB dimana PDK dan PNGL konstan
- e = frekuensi gangguan stokhastik

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Ho = b₁, b₂, b₃ = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari PNGL, PDRB dan PDK terhadap PAD
- Ha = b₁, b₂, b₃ ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan dari PNGL, PDRB, dan PDK terhadap PAD

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Luas wilayah secara keseluruhan Kabupaten Kediri adalah 1.386,05 km². Secara administrasi wilayah Kabupaten Kediri terbagi menjadi 23 Kecamatan, 344 Desa/Kelurahan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kediri selalu meningkat. Pada tahun 2002, jumlah penduduk Kabupaten Kediri 1.407.921 jiwa. Tingkat perkembangan penduduk pada 14 tahun terakhir ini antara 0,21 persen sampai 1,84 persen. Tingkat perkembangan penduduk terbesar terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 1,84 persen. Sedangkan perkembangan penduduk terkecil terjadi pada tahun 1995 yaitu 0,21 persen. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan daerah sehingga daerah tersebut dapat maju dan berkembang. Oleh karena itu Kabupaten Kediri sebagai daerah otonom harus bisa memacu partisipasi masyarakatnya dengan membangun sarana dan prasarana yang baik, hal ini sangat berpengaruh bagi tingginya mobilitas dan produktivitas masyarakat daerah

Peranan ekonomi sektoral PDRB Kabupaten Kediri dilihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB yang didasarkan atas harga konstan dari tahun 1989 sampai 2002 menunjukkan sumbangan terbesar yaitu pada sektor pertanian yaitu dari 43,74 persen sampai 48,79 persen. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan pada sektor pertanian dari tahun ke tahun besar.

Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kediri tidak dapat optimal, disebabkan karena pajak-pajak yang *buoyant* dan *lucrative* dikuasai oleh pemerintah pusat, seperti pajak pendapatan, pajak ekspor, pajak penjualan minyak atau oleh propinsi seperti Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemerintah daerah Kabupaten/Kota hanya diberikan beberapa sumber pajak dan retribusi daerah yang potensial untuk dipungut, seperti Pajak Pembangunan I, pajak penerangan jalan, retribusi pasar dan terminal.

Penerimaan pemerintah Kabupaten Kediri masih didominasi oleh dana perimbangan dan pinjaman daerah. Peranan PAD masih sangat kecil. Namun pada dua tahun terakhir pemerintah Kabupaten Kediri sudah dapat mengoptimalkan penerimaan melalui PAD, bahkan pada tahun 1999 pemerintah Kabupaten Kediri tidak melakukan pinjaman daerah. Ini mencerminkan bahwa hanya dalam satu tahun pemerintah Kabupaten Kediri dapat mengoptimalkan PADnya dan menekan pinjaman daerah.

Pengeluaran rutin meliputi belanja pegawai, biaya pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas dan lain-lain. Pada tahun 1989 sampai 1997, pengeluaran rutin lebih kecil dari pengeluaran pembangunan. Tetapi pada tahun 1998 sampai 2002 pengeluaran rutin lebih besar dari pengeluaran pembangunan. Dengan adanya perbedaan yang besar antara pengeluaran rutin dan pembangunan ini menandakan bahwa pola pembangunan yang dijalankan masih bersifat konsumtif dan tidak dialokasikan pada sektor-sektor yang lebih produktif guna meningkatkan PAD nantinya.

Hasil Regresi

Dilihat dari hasil analisis dapat diperoleh persamaan matematisnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \ln PAD &= -112,494 + 0,398 \ln P NGL + 8,049 \ln PDK + 0,573 \ln PDRB \\ \text{Standart Error} &= (0,133) \quad (3,216) \quad (0,97) \\ \text{Nilai } t &= (2,994) \quad (2,503) \quad (5,938) \\ F_h &= 148,59 \\ R^2 &= 0,978 \end{aligned}$$

Besarnya R² adalah 0,978, ini berarti 97,8 persen variabel PAD bisa dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu variabel Pengeluaran Pembangunan, Penduduk dan PDRB. Sedangkan sisanya (100 persen - 97,8 persen = 2,2 persen) dijelaskan oleh sebab-

sebab yang lain diluar model. *Standard Error of Estimate* (SE) sebesar 0,1287384. Semakin kecil nilai SE maka akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

Hasil regresi menunjukkan bahwa ternyata variabel Pengeluaran Pembangunan mempunyai koefisien regresi sebesar 0,398. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan Pengeluaran Pembangunan sebesar 1 persen maka akan meningkatkan PAD sebesar 0,398 persen (faktor lain dianggap konstan). Variabel Penduduk mempunyai koefisien regresi sebesar 8,049. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan variabel Penduduk sebesar 1 persen maka akan meningkatkan PAD sebesar 8,049 persen (faktor lain dianggap konstan). Variabel PDRB mempunyai koefisien regresi sebesar 0,573. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan PDRB sebesar 1 persen maka akan meningkatkan PAD sebesar 0,573 persen (faktor lain dianggap konstan).

Dari hasil regresi, diperoleh F hitung sebesar 148,529. Tingkat signifikan 95 persen ($\alpha = 5$ persen) maka diperoleh nilai F tabel untuk derajat kebebasan (df) = 3 dan 10, F 0,05 (3,10) adalah 3,71. Ini berarti F hitung lebih besar dari F tabel, dengan demikian hipotesis nol dapat ditolak yang berarti secara bersama-sama variabel Pengeluaran Pembangunan, Penduduk dan PDRB mampu menerangkan dengan variabel dependen yaitu variabel PAD.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi presentasi perubahan PAD adalah Total pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB sangat kuat, hal ini didukung dengan tingkat koefisiensi determinasi (R^2) sebesar 0,971. Ketiga variabel independen (Pengeluaran Pembangunan, Penduduk, PDRB), yang mempunyai pengaruh paling besar yaitu variabel penduduk sebesar 8,049.

Saran

- Meningkatkan ketiga sektor yang dominan dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor industri.
- Meningkatkan pengeluaran pemerintah dari segi pengeluaran pembangunan agar pembangunan Kabupaten Kediri dapat dilakukan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, 1997. *Otonomi Daerah dan Kinerja Aparatur Pemerintah daerah Tingkat II*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, No 1, Vol 2, FE UII, Yogyakarta
- Agus Widarjono, 1999. *Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia : Analisis Kausalitas*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 4 No 2 Tahun 1999
- Ari Budiharjo, 2003. *Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kabupaten dan Kota Di Propinsi Jawa Tengah*, Tesis Pasca Sarjana UNDIP, Tidak Diterbitkan
- Damodar Gujarati, 1995. *Ekonometrika Dasar*, terjemahan Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta
- Daru Kuncoro, 2003. *Analisis Kemampuan PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah*, Tesis Pasca Sarjana UNDIP, Tidak diterbitkan
- F.X. Yuwono Prawirosetoto, 2002. *Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, No 2, Vol 2, FE Universitas Atmajaya, Jakarta

- Guritno Mangkusubroto, 1993. *Ekonomi Publik*, PBFE UGM, Yogyakarta
- J Kaloh, 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta
- J Supranto, 1983. *Ekonometrika*, Buku Satu. LPFE UI, Jakarta
- Jamaludin Ahmad, 1990. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat-Daerah; kasus di Aceh, Jatim, dan daerah Khusus Ibu Kota*, Disertasi Doktor UGM, Yogyakarta
- Josef Riwu Kaho, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kantor Statistik Kabupaten Kediri, Berbagai Tahun, *Kabupaten Kediri dalam Angka*, Kediri
- Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur, Berbagai Tahun, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, Surabaya
- M Suparmoko, 1992. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, BPFE UGM, Yogyakarta
- Pudji Suprayitno, 2003. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Fiskal daerah (studi kasus di Kabupaten Banjarnegara)*, Tesis, Tidak diterbitkan.
- Rohmad Sumitro, 1980. *Pokok-pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta
- Sadono Sukirno, 1994. *Pengantar Teori Makroekonomi*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sismadi, 2002. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi PAD Kabupaten Klaten dalam Upaya Mencapai Kemandirian Daerah*. Skripsi Stata 1 UNDIP. Tidak diterbitkan
- Sucipto Wirosardjono, 1998. *Pertumbuhan Penduduk Indonesia Catatan Analisa*, Prisma, No 3 Tahun XVII
- Suhut Rahmadhani, 2000. *Analisis Tingkat Kesiapan Kabupaten Demak Menuju Daerah yang Otonom*, Skripsi Stata 1 UNDIP, Tidak diterbitkan
- Sri Susilo Y, 2002. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Ekonomi Regional dan Sektoral*, Empirika, Surakarta
- Sri Wijayanti, 2002. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sumbangan/Bantuan Pemerintah Pusat dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus*, Skripsi Stata 1 UNDIP, Tidak diterbitkan
- TB Silalahi, et.al., 1995. *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, PT Sinar Agape Press, Jakarta
- Tubagus Rully Ferdian, 2000, *Menyoal Desentralisasi Fiskal yang Adil*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, No 2, Vol 5, FE UII, Yogyakarta
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Undang-undang No 18 Tahun 1997 Tentang *Pajak dan Restribusi Daerah*
- Undang-undang No 34 Tahun 2000 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997*
- Zaenal Arifin, 2001, *Pemerataan Pembangunan dan Otonomi Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, No 1, Tahun V, Salatiga